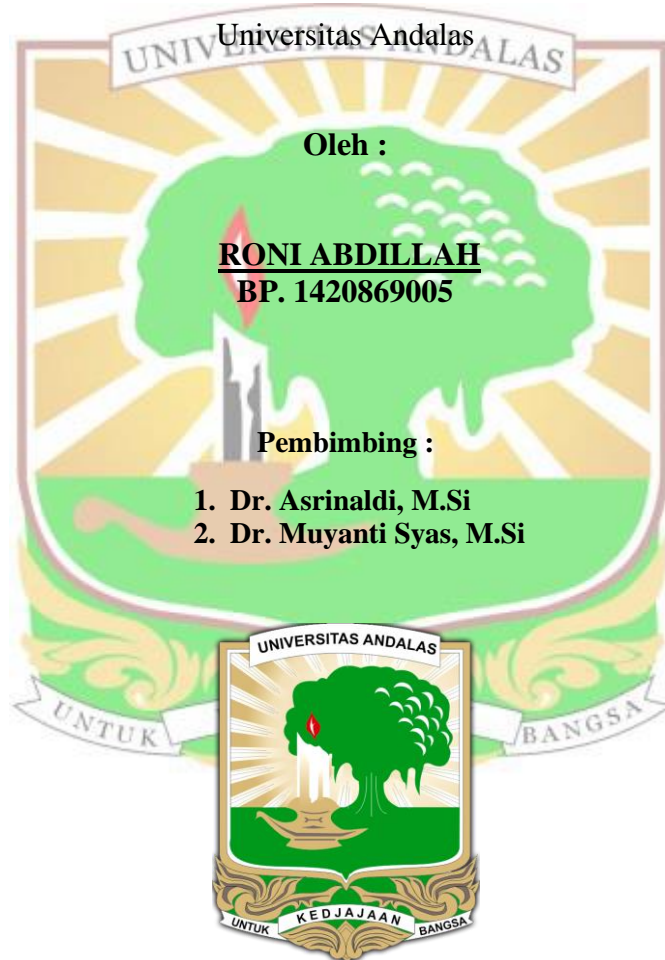


DISTORSI INFORMASI PUBLIK

(Studi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister
pada Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

DISTORSI INFORMASI PUBLIK

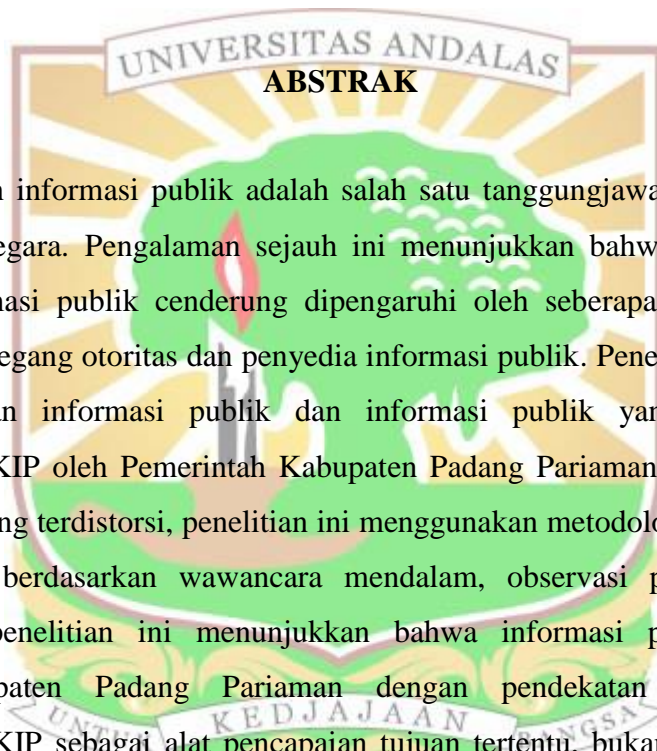
(Studi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

Oleh :

**Roni Abdillah
(BP. 1420869005)**

Pembimbing :

Dr. Asrinaldi, M.Si dan Dr. Mulyanti Syas, M.Si



Keterbukaan informasi publik adalah salah satu tanggungjawab penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa proses perwujudan keterbukaan informasi publik cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dan komitmen dari pemegang otoritas dan penyedia informasi publik. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan informasi publik dan informasi publik yang terdistorsi dalam implementasi UU KIP oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengungkap informasi publik yang terdistorsi, penelitian ini menggunakan metodologi hermeneutik kritis Jürgen Habermas berdasarkan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi publik dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan pendekatan instrumental yang memanfaatkan UU KIP sebagai alat pencapaian tujuan tertentu, bukan pencapaian wacana transparansi. Informasi publik terdistorsi secara sistematis karena kuatnya ideologi politik dalam birokrasi yang menghasilkan sistem kesalahpahaman, akibatnya PPID tidak menyadari telah saling salah paham dalam penyediaan informasi publik. Distorsi informasi publik ini mencerminkan bahwa implementasi UU KIP hanya sebagai ornamen demokrasi.

Kata Kunci : Informasi Publik, Distorsi, Hermeneutik Kritis

DISTORTION OF PUBLIC INFORMATION

*(A Study on the Implementation of Public Information Disclosure
by the Government of Padang Pariaman Regency)*

By :

**Roni Abdillah
BP. 1420869005**

Supervisor :

Dr. Asrinaldi, M.Si and Dr. Mulyanti Syas, M.Si



Public information disclosure is one of the responsibilities of the organizers and the administration of the state. Experience so far suggests that the process of public information disclosure tends to be influenced by how willing and willing the authorities and information providers are. This research describes the management of public information and distorted public information in the implementation of UU KIP by the Government of Padang Pariaman Regency. To disclose distorted public information, this study used the critical hermeneutic methodology of Jurgen Habermas based on in-depth interviews, participant observations, and document studies. The results of this study indicate that public information is managed by the Government of Padang Pariaman Regency with an instrumental approach that takes advantage of UU KIP as a means of achieving certain goals, not the achievement of transparency discourse. Public information is systematically distorted because of the strong political ideology in the bureaucracy that produces a misunderstanding system, consequently the PPID is not aware of having misunderstood each other in the provision of public information. The distortion of this public information reflects that the implementation of UU KIP is only a democratic ornament.

Keywords: *Public Information, Distortion, Critical Hermeneutics*